

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman

- Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara.
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
 22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
 23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.
 24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
 25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga.
 27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
 28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
 29. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI ACEH ESELON I SETJEN

A.2.1 PROFIL BPK PERWAKILAN PROVINSI ACEH ESELON I SETJEN

Profil

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap Ibukota Provinsi. Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen adalah satuan kerja vertikal BPK yang berkedudukan di Kota Banda Aceh

1. Lingkup Tugas

Lingkup tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup tiga jenis pemeriksaan, terdiri dari:

- (1) Pemeriksaan keuangan; yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- (2) Pemerikaan Kinerja; yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian DPR, DPD dan DPRD.
- (3) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT); yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas pengendalian intern pemerintah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut, hasil pemeriksaan BPK juga diserahkan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

2. Organisasi BPK

Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu, (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja

kesetjenan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarpras sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan yang tertuang dalam Surat Keputusan BPK No.3/K/I-XIII.2/7/2014 sebagaimana telah diubah empat kali dengan perubahan pertama SK BPK No.1/K/I-XIII.2/2/2016; perubahan kedua SK BPK No.10/K/I-XIII.2/11/2016; perubahan ke tiga SK BPK No.13/K/I-XIII.2/12/2016 dan perubahan ke empat SK BPK No.14/K/I-XIII.2/9/2017.

3. Pegawai BPK

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Status Pegawai BPK adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pola rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada Renstra 2016—2020, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

4. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK, antara lain:

- a) Lembaga perwakilan, yaitu: DPR, DPD, dan DPRD;
- b) Pemerintah, yaitu instansi pemerintah Pusat/Daerah;
- c) Instansi penegak hukum;
- d) Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
- e) Organisasi kemasyarakatan dan profesi; dan
- f) Warga Negara Indonesia.

A.2.2 RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI ACEH ESELON I SETJEN

Rencana Strategis BPK

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen adalah satuan kerja vertikal BPK, maka Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen menginduk Renstra Lembaga BPK.

Renstra BPK Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1. Visi

“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”.

2. Misi

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
- b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

3. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misinya BPK menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. Integritas; bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
- b. Independensi; bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi.
- c. Profesionalisme; dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada struktur yang berlaku.

4. Tujuan Strategis

Melalui pelaksanaan misinya, BPK berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara;
- b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

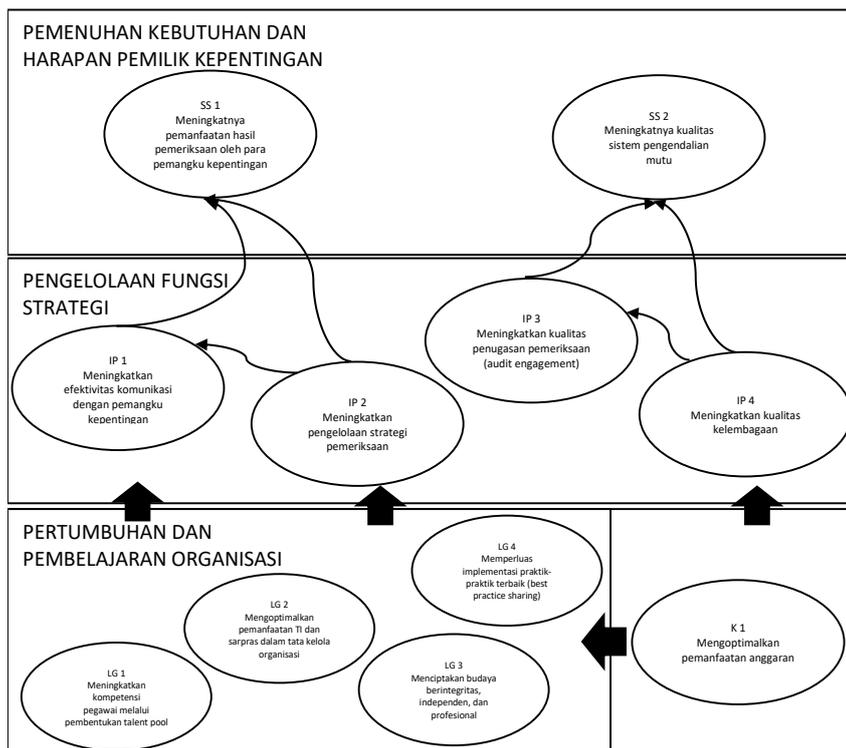
5. Sasaran Strategis

Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, BPK menetapkan dua sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan (SS₁);
- b. Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu (SS₂).

Dalam mencapai sasaran strategis (SS), maka diidentifikasi proses-proses internal atau *Internal Process* (IP) di BPK yang dianggap signifikan dalam mengungkit tercapainya tujuan strategis. Lebih lanjut, untuk memastikan bahwa proses-proses tersebut dapat berjalan dengan baik maka perlu disediakan dukungan modal organisasi, pertumbuhan dan pembelajaran organisasi atau *Learning and Growth* (LG) yang terdiri dari sumber daya manusia, teknologi informasi, budaya organisasi serta manajemen pengetahuan.

PETA STRATEGIS



6. Indikator Kinerja Utama BPK

Untuk mewujudkan visi dan misi BPK melalui tujuan strategis dan sasaran strategis, ditetapkan ukuran keberhasilan dalam jangka waktu lima tahun yaitu berupa Indikator Kinerja Utama (IKU).
 IKU Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen sebagai berikut:

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018 Audited

	Sasaran Strategis		INDIKATOR KINERJA	TARGET
SS 1	Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan	1.1	Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan Dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan (Skala 1 - 5)	3,5
		1.2	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	60%
SS 2	Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu	2.1	Presentase LHP yang digugat dan BPK dinyatakan kalah	0%
		2.2	Indeks Kepuasan Auditee Atas Kinerja Pemeriksa BPK (Skala 1 - 5)	3,6
		2.3	Indeks Mutu Organisasi (Skala 1 - 5)	3,5%
		2.4	Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	A
		2.5	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A
IP 1	Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan pemangku kepentingan	3.1	Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK	100%
		3.2	Pendapat BPK yang Diterbitkan	4
		3.3	Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi (Skala 1 - 5)	3,8
IP 2	Meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan	4.1	Presentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan	100%
		4.2	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan	85%
		4.3	Presentase Pemeriksaan Kinerja	15%
		4.4	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%
IP 3	Meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan (audit engagement)	5.1	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dan <i>Quality Control</i>	100%
		5.2	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Utama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK	70%
		5.3	Tingkat Evaluasi atas LHP	100%
IP 4	Meningkatkan kualitas kelembagaan	6.1	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil <i>Peer Review</i>	60%
		6.2	Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan Perundangan Terkait Tugas dan Wewenang BPK	50%
		6.3	Tingkat Harmonisasi Peraturan Perundangan Terkait Tugas dan Wewenang BPK	10%
LG 1	Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan talent pool	7.1	Presentase Pemenuhan <i>Talent Pool</i>	0%
		7.2	Indeks Kepuasan Pegawai (Skala 1 - 5)	3,3
LG 2	Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam tata kelola organisasi	8.1	Presentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi	80%
		8.2	Presentase Pemanfaatan TI	80%
		8.3	Tingkat Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan TI dan Sarpras	3,5
LG3	Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional	9.1	Tingkat Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	3,3
		9.2	Tingkat Implementasi Nilai Dasar BPK	3,0
		9.3	Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai	0%
LG 4	Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (best practice sharing)	10.1	Penyusunan <i>Best Practice</i>	0%
		10.2	Penyebaran <i>Best Practice</i>	0%
K1	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran	11.1	Tingkat Kinerja Anggaran	80%

Matrik hubungan antara tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama yang digunakan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018 Audited

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Nama IKU	
Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara	SS 1 Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan	Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan Dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan	
		Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	
		Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK	
	IP 1 Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan pemangku kepentingan	Meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan	Pendapat BPK yang Diterbitkan
			Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
			Presentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan
	IP 2	Meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan
			Presentase Pemeriksaan Kinerja
			Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan
Presentase LHP yang digugat dan BPK dinyatakan kalah			
Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara	SS 2 Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu	Indeks Kepuasan Auditee Atas Kinerja Pemeriksa BPK	
		Indeks Mutu Organisasi	
		Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	
		Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dan <i>Quality Control</i>	
	IP 3 Meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan (audit engagement)	Meningkatkan kualitas kelembagaan	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Utama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK
			Tingkat Evaluasi atas LHP
			Presentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Peer Review
	IP 4	Meningkatkan kualitas kelembagaan	Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan Perundangan Terkait Tugas dan Wewenang BPK
			Tingkat Harmonisasi Peraturan Perundangan Terkait Tugas dan Wewenang BPK
			Presentase Pemenuhan <i>Talent Pool</i>
	LG 1 Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan talent pool	Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan talent pool	Indeks Kepuasan Pegawai
			Presentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi
	LG 2 Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam tata kelola organisasi	Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam tata kelola organisasi	Presentase Pemanfaatan TI
			Tingkat Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan TI dan Sarpras
Tingkat Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK			
LG3 Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional	Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional	Tingkat Implementasi Nilai Dasar BPK	
		Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai	
		Penyusunan <i>Best Practice</i>	
LG 4 Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (best)	Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (best)	Penyebaran <i>Best Practice</i>	
		Tingkat Kinerja Anggaran	
K1 Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran	Tingkat Kinerja Anggaran	

7. Lingkungan Strategis BPK

Lingkungan strategis BPK meliputi nasional dan lingkungan strategis internasional. Lingkungan strategis nasional meliputi antara lain tantangan bangsa Indonesia dan agenda pembangunan serta harapan pemangku kepentingan. Lingkungan strategis internasional yaitu aktif di dalam kegiatan organisasi lembaga pemeriksa sedunia atau International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), pada tingkat Asia atau The Asian Organisation of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) dan pada tingkat ASEAN atau ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI).

A.2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN BPK

Program dan Kegiatan BPK

Di dalam perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025 telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJP Nasional tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan dan acuan RPJP Daerah.

RPJMN tersebut memuat antara lain strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga (KL) dan lintas KL, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro. RPJMN tersebut dijabarkan dalam rencana pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Selanjutnya, RKP disusun berdasarkan RPJM. Dokumen perencanaan RPJM dan RKP tersebut menjadi dasar penyusunan Renstra KL. Renstra KL tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan KL dan bersifat indikatif. Renstra KL tersebut menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan KL yang berisi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Sebagai lembaga negara, BPK melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan SPPN. Untuk itu, dokumen anggaran, khususnya RPJP dan RPJM Nasional, menjadi pertimbangan penyusunan Renstra BPK. Selanjutnya, Renstra BPK tersebut menjadi acuan penyusunan Renja BPK dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK sebagai dokumen anggaran tahunan BPK.

Pada Tahun Anggaran 2018, BPK melakukan restrukturisasi program dan unit organisasi berupa perubahan klasifikasi Unit Organisasi Eselon I pada Bagian Anggaran 04 (BA 04) dari dua Unit Organisasi Sekretariat Jenderal (BA 004.01) dan BPK Pusat (BA 004.02) menjadi satu Unit Organisasi Sekretariat Jenderal (BA 004.01). Perubahan program/kegiatan BPK pada tahun 2018 dirincikan sebagai berikut:

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018 Audited

Program/Kegiatan Lama	Program/Kegiatan Baru	Pengampu Eselon I	Pengampu Eselon II
004 : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	004 : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN		
01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK		
1032 : Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri	1032 : Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri	Sekretariat Jenderal	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional (Biro Humas dan KSI) dan Biro Sekretariat Pimpinan
1033 : Manajemen SDM	1033 : Manajemen SDM	Sekretariat Jenderal	Biro Sumber Daya Manusia (SDM)
1034 : Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	1034 : Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan
5644 : Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	5644 : Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	Sekretariat Jenderal	Pusdiklat
02 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	1152 : Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum	Sekretariat Jenderal	Biro Umum dan Biro Teknologi Informasi
1035 : Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum			
03 : Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK	08 : Program Pemeriksaan Keuangan Negara		
1036 : Pengawasan Oleh Inspektorat	1153 : Pengawasan Oleh Inspektorat	Inspektorat Utama	Inspektorat PIMK, PKMP dan PI
06 : Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	1154 : Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah	Ditama Binbangkum	Direktorat KHK
1037 : Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah	1155 : Pelayanan Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum	Ditama Binbangkum	Direktorat LPBH
1038 : Pelayanan Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum	1156 : Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	Ditama Revbang	Direktorat PSMK
07 : Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara	1157 : Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan	Ditama Revbang	Direktorat EPP
1039 : Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	1158 : Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara	Ditama Revbang	Direktorat Litbang
1040 : Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan	1043 : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	AKN I-VII, Auditorat Utama Investigasi, dan Staf Ahli	- Auditorat pada AKN I - VII dan AUI - BPK Perwakilan
1041 : Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara	1159 : Manajemen SDM Pemeriksaan Keuangan Negara	Sekretariat Jenderal	Biro Sumber Daya Manusia (SDM)
08 : Program Pemeriksaan Keuangan Negara			
1043 : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara			

Dari restrukturisasi program diatas terdapat perubahan Unit Organisasi dan Satker BPK Tahun Anggaran 2018. Perubahan Unit Organisasi dan Satker BPK Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Bagian Anggaran/Unit Organisasi/Satker	2017		2018
Bagian Anggaran (BA)	Badan Pemeriksa Keuangan (04)		Badan Pemeriksa Keuangan (04)
Unit Organisasi	Sekretariat Jenderal (01)	BPK Pusat (02)	Badan Pemeriksa Keuangan (01)
Satker/DIPA:			
a. Kantor Pusat	1 Satker/DIPA Setjen	1 Satker/DIPA BPK Pusat	1 Satker/DIPA Setjen 1 Satker/DIPA BPK Pusat
b. Pusdiklat	1 Satker/DIPA Pusdiklat	-	1 Satker/DIPA Pusdiklat
c. Balai Diklat	3 Satker/DIPA Balai Diklat	-	3 Satker/DIPA Balai Diklat
d. Museum	-	-	1 Satker/DIPA Museum
e. Perwakilan	34 Satker/DIPA Perwakilan	34 Satker/DIPA Perwakilan	34 Satker/DIPA Perwakilan
Total	39 Satker/DIPA	35 Satker/DIPA	41 Satker/DIPA

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh menerapkan basis akruwal dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akruwal adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPK yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

b. Pedapatan-LO

Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPK adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan;

- Pendapatan dari Pemindah Tangan BMN diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan penghapusan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan Pelunasan ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara diakui saat dikeluarkannya surat keputusan TP/TGR atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

c. Belanja

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Beban

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Aset

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Pada setiap akhir periode tahun anggaran, seluruh Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya pada satuan kerja Eselon I BPK Pusat telah ditransfer keluar ke satuan kerja Eselon I Setjen.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini, meliputi:

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas terdiri atas:

- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Muka dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari Uang Muka dari KPPN yang belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
- Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Muka dari KPPN, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari:

- Pendapatan yang belum Disetor
Pendapatan negara yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran pada suatu periode anggaran namun pada akhir tahun anggaran belum disetorkan ke Kas Negara, yaitu berupa pajak, pengembalian belanja perjalanan dinas dan belanja pegawai (honor pegawai, TKPK serta gaji), jasa giro, penerimaan PNBPN, dan lain-lain yang belum disetorkan.
Khusus untuk Pengembalian Belanja tahun berjalan yang belum disetor, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.
- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
Utang kepada pihak ketiga yang berada pada Bendahara Pengeluaran yaitu berupa Honor, gaji/TKPK, uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai, serta uang lainnya yang belum

dibayarkan kepada pihak ketiga lainnya pada tanggal Neraca.

Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.

- Utang Jangka Pendek Lainnya

Pajak yang dipotong oleh Bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.

▪ Belanja dibayar dimuka (*prepaid*)

Belanja dibayar dimuka (*prepaid*) BPK berasal dari realisasi belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitasnya dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/dinikmati oleh satuan kerja.

Belanja dibayar dimuka BPK berasal dari realisasi belanja barang untuk sewa gedung/bangunan dengan jangka sewa melebihi tahun pelaporan. Belanja dibayar di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak perlu dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun mau pun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai aset lancar.

Adapun metode perhitungan Belanja Barang Dibayar Dimuka adalah nilai sewa dibagi dengan jumlah hari masa sewa seluruhnya (asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari atau 366 hari jika tahun yang berkenaan kabisat) dikalikan dengan jumlah sisa hari masa sewa yang masih belum digunakan.

▪ Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang pada BPK berasal dari Piutang Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca.

Akun Piutang Bukan Pajak perlu diidentifikasi apakah masuk dalam kategori Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atau Piutang PNBK dengan kebijakan yaitu:

- Pendapatan yang masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBK yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Kebijakan akuntansi untuk Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yaitu:

- Dasar pengakuan adalah perhitungan akuntansi atau tidak melalui penetapan.
- Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- Tidak dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

BPK tidak mempunyai akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

- Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Piutang Bukan Pajak pada BPK terdiri atas:

- Piutang PNBPN adalah pendapatan PNBPN tahun berjalan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh pemerintah (telah jatuh tempo), namun belum diterima pembayarannya.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang PNBPN yaitu:

- 1) Dasar pengakuan adalah Surat Tagihan/Surat Penetapan/Yang Dipersamakan.
- 2) Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- 3) Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Piutang PNBPN pada BPK berasal dari Piutang Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri, Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang yang belum dibayar oleh wajib bayar sampai pada tanggal neraca, Kelebihan pembayaran belanja modal karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan (yang dibayar melalui jaminan/Bank Garansi).

- Piutang Lainnya berasal dari piutang yang berasal dari selain Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Piutang Lainnya berasal dari:

- 1) Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas; serta
- 2) Kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada pegawai.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang Lainnya adalah:

- 1) Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya melainkan saat penyetoran ke Kas Negara.
- 2) Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dalam kondisi baik yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, beban persediaan hanya diperhitungkan untuk persediaan yang sifatnya umum, tidak termasuk persediaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan belanja bantuan sosial. Untuk persediaan yang bersifat umum, beban persediaan tahun berjalan termasuk didalamnya persediaan yang masih ada di gudang dengan kondisi rusak atau usang. Walaupun

secara fisik persediaan masih ada tidak diperhitungkan sebagai saldo persediaan. Apabila saldo persediaan akhir yang sebelum opname fisik nilainya lebih besar dari hasil opname fisik maka dicatat sebagai pengurang Persediaan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN pengakuan perolehan aset tetap sejak 2018 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Akibat dari penerapan perubahan kebijakan kapitalisasi aset tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, data BMN menjadi terbagi dua, yaitu:

- Daftar BMN Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/Penerimaan dari pertukaran/Pengalihan Masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Daftar BMN Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.
- Daftar BMN Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Peralatan dan mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp300.000,00, dan

yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp1.000.000,00 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Peralatan dan Mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp300.000,00 dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp1.000.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan mesin dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000,00, dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp25.000.000,00 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Gedung dan Bangunan dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Gedung dan Bangunan yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp10.000.000,00 dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp25.000.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Gedung dan Bangunan dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap. Dalam hal Aset Tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Akun Aset Tetap Renovasi di BPK terjadi karena 3 hal, yaitu:

- Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L (BPK).

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker Setjen) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja lain (BPK Perwakilan Provinsi/Badiklat PKN);

- Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain.
Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja K/L lain.
Pada poin 1) dan 2) apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- Renovasi aset tetap milik Instansi pemerintah lainnya (Pemda) dan Renovasi aset tetap milik pihak lain selain pemerintah (Swasta, BUMN/BUMD, Yayasan, dan lain-lain).
Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.
Apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
Aset tetap (termasuk Aset Tetap Renovasi) yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai

Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI revaluasi dilakukan pada tahun 2017. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyajian hasil revaluasi BMN dalam Laporan Neraca (laporan posisi BMN di Neraca) disajikan dengan nilai wajar hasil revaluasi tanpa akumulasi penyusutan. Secara umum akan terdapat tiga jurnal atas transaksi Penilaian Kembali BMN (kecuali atas Tanah) yaitu:

- Jurnal untuk menghapus akumulasi penyusutan (kode 205).
- Jurnal koreksi semu untuk menurunkan nilai perolehan menjadi nilai buku (kode 223).
- Jurnal untuk menyesuaikan nilai buku menjadi nilai hasil revaluasi (kode 205).

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa manfaat suatu BMN yang masih diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah;
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
- Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
- Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah

*Piutang
Jangka
Panjang*

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Piutang TP/TGR yang telah diserahkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN, karena macet dicatat sebagai Tagihan TP/TGR.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya meliputi:

- Aset Tak Berwujud meliputi software, lisensi, serta Aset Tak Berwujud Lainnya. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi amortisasi.

Pada Aset Lainnya—Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi mulai Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No. 620/KMK.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

- *Software* Komputer masa manfaat 4 tahun;
- Lisensi masa manfaat 10 tahun;
- *Franchise* masa manfaat 5 tahun;
- Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I masa manfaat 70 tahun;

- Hak Paten Sederhana masa manfaat 10 tahun;
- Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II masa manfaat 50 tahun;
- Paten Biasa masa manfaat 20 tahun;
- Merek masa manfaat 10 tahun.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas dan disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

f. Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

○ Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dalam pengelolaan keuangan BPK terdiri dari:

- Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari:
 - Belanja yang masih harus dibayar yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal; dan
 - Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang merupakan kontra akun dari Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran.

Kewajiban ini timbul akibat hak atas barang/jasa telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh kementerian negara/Lembaga/ pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Khusus untuk belanja modal yang masih harus dibayar tidak mempengaruhi beban laporan operasional, tetapi bersamaan dengan pengakuan belanja modal yang masih harus dibayar harus diakui adanya aset yang diperoleh. Dengan demikian apabila terdapat aset yang sudah diperoleh yang belum dibayar diakui sebagai kewajiban.

Pada saat pembayaran belanja yang masih harus dibayar tahun sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan cara mendebet akun belanja yang masih harus dibayar dan mengkredit akun beban pada tanggal yang sama. Dalam hal penyesuaian tidak dapat dilakukan pada tanggal transaksi, maka harus diperhitungkan pada akhir tahun untuk menentukan besarnya nilai pada jurnal penyesuaian.

- Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan pajak dan/atau pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah

untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pendapatan Diterima Dimuka di BPK antara lain berupa Pendapatan Sewa Diterima Dimuka. Pendapatan Sewa Diterima di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai kewajiban jangka pendek. Adapun metode perhitungan Pendapatan Sewa diterima di Muka adalah jumlah hari sisa masa sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Ketiga dibagi jumlah hari seluruhnya (asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari atau 366 hari jika tahun yang berkenaan kabisat) dikalikan dengan nilai sewa yang dibayarkan oleh pihak ketiga.

- Utang Jangka Pendek Lainnya Yaitu pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.
- Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

g. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan Umum LRA Anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	-	73.000.142	100,00
	a. Penerimaan Pajak	-	-	-
	b. PNBPN	-	73.000.142	100,00
	c. Hibah	-	-	-
2	Realisasi Belanja Negara	30.061.092.000	28.509.664.864	94,84
	- Belanja Rupiah Murni	30.061.092.000	28.509.664.864	94,84
	- Belanja Pinjaman LN	-	-	-
	-Belanja Rupiah Pendamping	-	-	-
	-Belanja Hibah LN	-	-	-
	-Belanja Barang Non Kas	-	-	-

Selama periode TA 2018, Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari penetapan awalnya. Hal ini disebabkan adanya penambahan belanja pegawai dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan estimasi pendapatan dan anggaran belanja TA 2018 berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 8

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
1	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	-	-
	a. Penerimaan Pajak	-	-
	b. PNBPN	-	-
	c. Hibah	-	-
2	Realisasi Belanja Negara	29.411.092.000	30.061.092.000
	- Belanja Rupiah Murni	29.411.092.000	30.061.092.000
	- Belanja Pinjaman LN	-	-
	-Belanja Rupiah Pendamping	-	-
	-Belanja Hibah LN	-	-
	-Belanja Barang Non Kas	-	-

(Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 1)

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Rp73,00 juta Realisasi Pendapatan pada TA 2018 adalah sebesar Rp73.000.142,00 atau mencapai 100,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan dan hibah TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Estimasi dan Realisasi Pendapatan dan Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan & Hibah	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (42512)	-	62.800.000	100,00
2	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42513)	-	-	-
3	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (42515)	-	-	-
4	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (42542)	-	-	-
5	Pendapatan Jasa Lainnya (42569)	-	-	-
6	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening (42576)	-	-	-
7	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (42579)	-	-	-
8	Pendapatan Denda I (42581)	-	-	-
9	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I (42591)	-	10.200.142	100,00
10	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan (42591)	-	-	-
11	Pendapatan Lain-Lain II (42599)	-	-	-
Jumlah		-	73.000.142	100,00

Realisasi pendapatan TA 2018 melampaui estimasi disebabkan oleh adanya pendapatan dari pemindahtanganan pemanfaatan BMN dan penerimaan kembali belanja Tahun Anggaran yang lalu.

Realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp48.265.142,00 atau sebesar 195,13% dibandingkan TA 2017 sebesar Rp24.735.000,00.

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Hibah
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan & Hibah	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / (penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan dari Pemindah tanganan BMN (42512)	62.800.000	-	62.800.000	100,00
2	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42513)	-	-	-	-
3	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (42515)	-	-	-	-
4	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (42542)	-	-	-	-
5	Pendapatan Jasa Lainnya (42569)	-	-	-	-
6	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening (42576)	-	-	-	-
7	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (42579)	-	-	-	-
8	Pendapatan Denda I (42581)	-	-	-	-
9	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I (42395)	-	24.260.000	(24.260.000)	(100,00)
10	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I (42591)	10.200.142	-	10.200.142	100,00
11	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan (42593)	-	-	-	-
12	Pendapatan Lain-Lain II (42599)	-	475.000	(475.000)	(100,00)
Jumlah		73.000.142	24.735.000	48.265.142	195,13

Kenaikan/penurunan realisasi pendapatan TA 2018 tidak dapat dibandingkan dengan pendapatan TA 2017 karena adanya perubahan Bagan Akun Standar sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

(Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 4,5)

B.2.2. BELANJA

Realisasi Belanja Negara Rp28.509,66 juta Realisasi Belanja TA 2018 adalah sebesar Rp28.509.664.864,00 atau 94,84% dari anggaran belanja sebesar Rp30.061.092.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 (dalam Rupiah)

Kode	Uraian	TA 2018		
		Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	8.220.718.000	8.120.658.381	98,78
52	Belanja Barang	21.663.374.000	20.232.029.298	93,39
53	Belanja Modal	177.000.000	176.630.500	99,79
Total Belanja Kotor		30.061.092.000	28.529.318.179	94,90
Pengembalian Belanja		-	19.653.315	-
Jumlah		30.061.092.000	28.509.664.864	94,84

Sedangkan menurut program, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Program untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 (dalam Rupiah)

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	%
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	-	-	-
08	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	30.061.092.000	28.509.664.864	94,84
Jumlah		30.061.092.000	28.509.664.864	94,84

Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 96,53% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan realisasi belanja TA 2018 dan TA 2017 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian Jenis Belanja	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	8.115.551.966	7.149.090.530	966.461.436	13,52
52	Belanja Barang	20.217.482.398	7.201.760.235	13.015.722.163	180,73
53	Belanja Modal	176.630.500	155.514.700	21.115.800	13,58
Jumlah		28.509.664.864	14.506.365.465	14.003.299.399	96,53

Kenaikan realisasi belanja TA 2018 dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2017 antar lain disebabkan oleh :

1. Kenaikan realisasi belanja pegawai terjadi karena adanya kenaikan pangkat para pegawai, kenaikan peran para pemeriksa BPK dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa, promosi jabatan struktural, pengangkatan CPNS menjadi PNS, pengaktifan kembali pegawai yang telah selesai menjalani tugas belajar, penambahan tunjangan tertentu, dan kenaikan gaji berkala pegawai.
2. Kenaikan realisasi belanja barang terjadi karena pada dasarnya standar biaya umum naik, begitu pula nilai/harga barang seperti tiket dalam perjalanan dinas dalam negeri dan juga karena laju inflasi yang didorong oleh kenaikan BBM.
3. Kenaikan realisasi belanja modal terjadi karena Perubahan perencanaan pembelian peralatan dan mesin yang berpengaruh pada lokasi dan harga satuan.

(Laporan Realisasi Anggaran Belanja dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 2,3)

B.2.2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp8.115,55 juta Pagu anggaran untuk Belanja Pegawai adalah Rp8.220.718.000,00 dan realisasi Belanja Pegawai TA 2018 sebesar Rp8.115.551.966,00 atau 98,72% dari alokasi Belanja Pegawai yang dianggarkan. Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing

sebesar Rp8.115.551.966,00 dan Rp7.160.693.000,00 Realisasi belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 13,52% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

- a. Penambahan jumlah pegawai sesuai dengan perencanaan awal.
- b. Penempatan pegawai pada jabatan tertentu (promosi) telah terealisasi.
- c. Tercapainya pembayaran tunjangan-tunjangan pegawai yang sudah dianggarkan.

d. Tercpainya pembayaran uang makan pegawai yang sudah dianggarkan.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
5111	Belanja gaji & tunjangan PNS	7.737.750.381	6.777.752.930	959.997.451	14,16
5113	Belanja gaji & tunjangan pejabat negara	-	-	-	-
5121	Belanja Honorarium	-	-	-	-
5122	Belanja Lembur	382.908.000	382.900.000	8.000	0,00
5124	Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto		8.120.658.381	7.160.652.930	960.005.451	13,41
Pengembalian Belanja		5.106.415	11.562.400	(6.455.985)	(55,84)
Jumlah Netto		8.115.551.966	7.149.090.530	966.461.436	13,52

Realisasi Pengembalian Belanja Pegawai TA 2018 adalah sebesar Rp5.106.415,00 yang merupakan Pengembalian belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp5.106.415,00

B.2.2.2. Belanja Barang

Belanja Pagu anggaran untuk Belanja Barang adalah Rp21.663.374.000,00 dan
Barang realisasi Belanja Barang TA 2018 sebesar Rp20.217.482.398,00 atau
Rp20.217,48 93,33% dari alokasi Belanja Barang yang dianggarkan.
juta Realisasi belanja barang TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing
sebesar Rp20.217.482.398,00 dan Rp7.201.760.235,00.

Realisasi belanja sampai dengan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 180,73% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

- Meningkatnya harga barang untuk belanja barang operasional dan barang persediaan.
- Meningkatnya tarif jasa untuk belanja jasa dan belanja pemeliharaan.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	3.676.504.758	1.059.670.756	2.616.834.002	246,95
5212	Belanja Barang Non Operasional	1.044.102.020	851.940.599	192.161.421	22,56
5218	Belanja Barang Persediaan	329.016.527	481.874.655	(152.858.128)	(31,72)
5221	Belanja Jasa	1.675.225.516	1.065.480.922	609.744.594	57,23
5231	Belanja Pemeliharaan	2.181.600.254	2.215.817.460	(34.217.206)	(1,54)
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	11.325.580.223	1.538.671.843	9.786.908.380	636,06
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah Belanja Bruto		20.232.029.298	7.213.456.235	13.018.573.063	180,48
Pengembalian Belanja		14.546.900	11.696.000	2.850.900	24,38
Jumlah Netto		20.217.482.398	7.201.760.235	13.015.722.163	180,73

Realisasi Pengembalian Belanja Barang TA 2018 adalah sebesar Rp14.546.900,00 yang merupakan Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp14.546.900,00

Realisasi Belanja Barang (52) TA 2018 yang dikapitalisasi ke aset tetap adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	Rp	-
2	Kapitalisasi pada Software	Rp	-
3	Kapitalisasi pada ATB Lainnya	Rp	-
JUMLAH		Rp	-

(Rincian Belanja Barang yang dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 32)

B.2.2.3. Belanja Modal

Belanja Modal Rp176,63 juta Pagu anggaran untuk Belanja Modal adalah Rp177.000.000,00 dan realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp176.630.500,00 atau 99,79% dari alokasi Belanja Modal yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp176.630.500,00 dan Rp155.514.700,00.

Realisasi belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 13,58% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

- Penambahan jumlah pegawai yang bertambah menyebabkan kebutuhan atas sarana dan prasarana juga ikut bertambah.
- Kebutuhan sarana Gedung dan Bangunan untuk mendukung kegiatan-kegiatan di kantor.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
5311	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.200.500	155.514.700	6.685.800	4,30
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.430.000	-	14.430.000	-
5361	Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto		176.630.500	155.514.700	21.115.800	13,58
Pengembalian Belanja		-	-	-	-
Jumlah Netto		176.630.500	155.514.700	21.115.800	13,58

Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2018 sebesar Rp0,00 dikapitalisasi pada aset tetap sebagai berikut:

1	Kapitalisasi pada Tanah	Rp	-
2	Kapitalisasi pada KDP	Rp	-
3	Kapitalisasi pada Aset Tetap dalam Renovasi	Rp	-
JUMLAH		Rp	-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2018 sebesar Rp162.200.500,00 dikapitalisasi pada aset tetap sebagai berikut:

1	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	Rp	162.200.500
2	Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	Rp	-
3	Kapitalisasi pada Irigasi	Rp	-
4	Kapitalisasi pada Jaringan	Rp	-
5	Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya	Rp	-
6	Kapitalisasi pada Aset Tetap dalam Renovasi	Rp	-
7	Kapitalisasi pada Software	Rp	-
8	Kapitalisasi Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	Rp	-
9	Tidak dikapitalisasi	Rp	-
JUMLAH		Rp	162.200.500

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2018 sebesar Rp14.430.000,00 tidak dikapitalisasi pada aset tetap.

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2018 sebesar Rp0,00 dikapitalisasi pada aset-aset sebagai berikut:

1	Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya	Rp	-
2	Kapitalisasi pada Aktiva Tetap dalam Renovasi	Rp	-
3	Kapitalisasi pada Software	Rp	-
4	Kapitalisasi pada Lisensi	Rp	-
5	Tidak dikapitalisasi	Rp	-
JUMLAH		Rp	-

(Rincian Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 33)

B.2.2.1.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp.0,00 juta Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Belanja Modal Tanah TA 2018

B.2.2.1.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp162,20 juta Pagu anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah Rp162.500.000,00 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 sebesar Rp162.200.500,00 atau 99,82% dari alokasi belanja modal yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp162.200.500,00 dan Rp155.514.700,00 Realisasi belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 4,30% dari TA 2017. Hal ini disebabkan oleh penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
Komputer Unit	-	-	-	-
Peralatan	162.200.500	155.514.700	6.685.800	4,30
Realisasi Belanja Bruto	162.200.500	155.514.700	6.685.800	4,30
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Jumlah Netto	162.200.500	155.514.700	6.685.800	4,30

B.2.2.1.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp14,43 juta

Pagu anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah Rp14.500.000,00 dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 sebesar Rp14.430.000,00 atau 99,52% dari alokasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp14.430.000,00 dan Rp0,00 Realisasi belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dari TA 2017. Hal ini disebabkan oleh penambahan sarana yang digunakan untuk kegiatan penunjang pemeriksaan di perwakilan.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
Gedung tempat kerja	14.430.000	-	14.430.000	-
Realisasi Belanja Bruto	14.430.000	-	14.430.000	-
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Jumlah Netto	14.430.000	-	14.430.000	-

B.2.2.1.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0,00 juta

Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018

B.2.2.1.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Belanja Modal Lainnya
Belanja Modal
Lainnya
Rp0,00 juta

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Perbandingan Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Komposisi Perbandingan Neraca
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	%
Aset	80.361.228.646	77.627.220.057	3,52
Kewajiban	83.756.487	226.191.360	(62,97)
Ekuitas	80.277.472.159	77.401.028.697	3,72

Jumlah Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp80.361.228.646,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp224.455.551,00, Aset Tetap sebesar Rp79.931.912.173,00, serta Aset Lainnya sebesar Rp204.860.922,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018 sebesar Rp83.756.487,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp80.277.472.159,00.

(Neraca dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 6)

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. ASET LANCAR

Aset Lancar Rp224,45 juta Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp224.455.551,00 dan Rp346.277.826,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 20
Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
3	Belanja Dibayar di Muka (<i>Prepaid</i>)	-	-
4	Piutang Bukan Pajak	-	10.675.142
5	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -	-	(53.376)
6	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	-
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	-
8	Persediaan	224.455.551	335.656.060
	Total	224.455.551	346.277.826

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00 juta

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Uang di rekening Bank BNI No.acc 852806666	-	-
Uang Tunai	-	-
Uang Muka/Voucher	-	-
Kuitansi UP yang belum di SPM GU	-	-
Pembulatan	-	-
Jumlah	-	-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 senilai Rp0,00 dengan rincian peyeteran nihil uang persediaan sebagai berikut:

Penyeteran Saldo nihil uang persediaan per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Tanggal Setor	No. NTPN	Nama Bank	Jumlah
1	28 Desember 2018	EA83C8IBT2JDTLM9	BNI	89.338.654
				-
Jumlah				89.338.654

Penyeteran Saldo uang persediaan setelah tanggal 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Tanggal Setor	No. NTPN	Nama Bank	Jumlah
				-
				-
Jumlah				-

C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00 juta

Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

C.2.1.3. Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

Belanja Dibayar di Muka (Prepaid) Rp0,00 juta

Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Belanja Dibayar di Muka (Prepaid) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

C.2.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp0,00 juta Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp10.675.142,00, terjadi penurunan sebesar Rp10.675.142,00 atau 100,00%. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca. Piutang Bukan Pajak terdiri dari Piutang PNPB dan Piutang Lainnya.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Piutang PNPB	-
2	Piutang Lainnya	-
	Jumlah	-

C.2.1.4.1. Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

C.2.1.4.2 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp10.675.142,00, terjadi penurunan sebesar Rp10.675.142,00 atau 100,00%.

Piutang Lainnya berasal dari seluruh penerimaan pemerintahan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah, misalnya Piutang Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri, Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan dan Gudang yang belum dibayar oleh wajib bayar sampai pada tanggal neraca.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Mutasi Piutang Lainnya
per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2017	10.675.142
Mutasi Tambah :	
Garansi Bank	-
Sewa Tanah	-
Sewa Rumah Dinas	-
Total Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang :	
Pelunasan s.d 31 Desember 2018	10.675.142
Total Mutasi Kurang	10.675.142
Total Mutasi	(10.675.142)
Saldo per 30 Juni 2018	-

Mutasi kurang sebesar Rp10.675.142,00 berasal dari adanya penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran tunjangan fungsional pada tahun anggaran yang lalu.

(Rincian penyetoran ke Kas Negara atas saldo tersebut dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 34)

C.2.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp0,05 juta Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp53.376,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besarnya tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang PNB	-
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Lainnya	-
	Jumlah	-

C.2.1.5.1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember

2018 dan 31 Desember 2017.

C.2.1.5.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp53.376,00, terjadi penurunan sebesar Rp53.376,00 atau 100,00%.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya berasal dari Piutang lainnya sebesar Rp53.376,00 dikategorikan dalam kualitas lancar, sehingga Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya sebesar Rp10.675.142,00 x 5% yaitu sebesar Rp53.376,00.

C.2.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

C.2.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

C.2.1.8. Persediaan

Persediaan Rp224,45 juta Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp224.455.551,00 dan Rp335.656.060,00, terjadi penurunan sebesar Rp111.200.509,00 atau 33,12%. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 24
Rincian Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Barang Konsumsi	186.509.210	267.144.010
2	Bahan untuk pemeliharaan	-	-
3	Suku Cadang	-	-
4	Pita, Cukai, Materai dan Leges	-	-
5	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-
6	Bahan Baku	-	-
7	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-
8	Persediaan Lainnya	37.946.341	68.512.050
	TOTAL	224.455.551	335.656.060

Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 pada Aplikasi SAIBA dan Persediaan tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 25
Rincian Perbandingan Nilai Persediaan pada Aplikasi SAIBA dan Persediaan Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan	SAIBA	Persediaan	Selisih
1	Barang Konsumsi	186.509.210,00	186.509.210,00	-
2	Bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
3	Suku Cadang	-	-	-
4	Pita, Cukai, Materai dan Leges	-	-	-
5	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-	-
6	Bahan Baku	-	-	-
7	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-	-
8	Persediaan Lainnya	37.946.341,00	37.946.341,00	-
	TOTAL	224.455.551,00	224.455.551,00	-

Persediaan tersebut di atas digunakan untuk kegiatan operasional Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen dalam kondisi baik. (Laporan Barang Persediaan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 26)

C.2.2. ASET TETAP

Aset Tetap Rp79.931,00 juta Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp79.931.912.173,00 dan Rp77.055.528.489,00, terjadi kenaikan sebesar Rp2.876.383.684 atau 3,73%. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 26
Rincian Perbandingan Aset Tetap Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Tanah	37.722.406.000	34.491.718.000
2	Peralatan dan Mesin	19.626.541.188	21.216.349.828
3	Gedung dan Bangunan	38.751.396.650	37.218.533.650
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.006.461.580	5.006.461.580
5	Aset Tetap Lainnya	146.465.965	144.014.550
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
	Jumlah	101.253.271.383	98.077.077.608
7	Akumulasi Penyusutan	(21.321.359.210)	(21.021.549.119)
	Nilai Buku Aset Tetap	79.931.912.173	77.055.528.489

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 pada Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 27
Rincian Perbandingan Aset Tetap pada Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN
Per 31 Desember 2018

(dalamRupiah)

No.	Uraian	SAIBA	SIMAK-BMN	Selisih
1	Tanah	37.722.406.000	37.722.406.000	-
2	Peralatan dan Mesin	19.626.541.188	19.626.541.188	-
3	Gedung dan Bangunan	38.751.396.650	38.751.396.650	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.006.461.580	5.006.461.580	-
5	Aset Tetap Lainnya	146.465.965	146.465.965	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	Jumlah	101.253.271.383	101.253.271.383	-
7	Akumulasi Penyusutan	(21.321.359.210)	(21.321.359.210)	-
	Nilai Buku Aset Tetap	79.931.912.173	79.931.912.173	-

C.2.2.1. Tanah

Tanah Rp37.722,40 juta Nilai Tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp37.722.406.000,00 dan Rp34.491.718.000,00, terjadi kenaikan sebesar Rp3.230.688.000,00 atau 9,36%.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Mutasi Tanah
per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2017	34.491.718.000
Mutasi Tambah:	
Transfer Masuk	3.230.688.000
Selisih revaluasi aset	-
Total Mutasi Tambah	3.230.688.000
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	3.230.688.000
Saldo per 31 Desember 2018	37.722.406.000

Penambahan Tanah yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Jumlah	-

Realisasi Belanja Modal untuk Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
531111	Belanja Modal Tanah	-
	Jumlah Belanja	-

Rincian saldo Tanah per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (M2)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4.968	7.734.262.000
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	-	-
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	-	-
4	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.332	3.890.687.000
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6.647	26.097.457.000
6	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	-	-
	Total	12.947	37.722.406.000

(Rincian mengenai lokasi, luas, dan status kepemilikan tanah dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 34)

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp19.626,54 juta Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp19.626.541.188,00 dan Rp21.216.349.828,00, terjadi penurunan sebesar Rp1.589.808.640,00 atau 7,49%.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018 Unaudited

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2017	21.216.349.828
Mutasi Tambah :	
Penambahan Saldo Awal	-
Pembelian	162.200.500
Transfer Masuk	447.783.100
Pembatalan Penghapusan	-
Pengembangan	-
Transaksi Normalisasi Aset Tetap	-
Reklasifikasi Masuk	-
Total Mutasi Tambah	609.983.600
Pengurangan :	
Penghapusan	-
Transfer Keluar	886.834.240
Reklasifikasi Keluar	-
Penghentian Aset Dari Penggunaan	1.312.958.000
Total Mutasi Kurang	2.199.792.240
Total Mutasi	(1.589.808.640)
Saldo per 31 Desember 2018	19.626.541.188
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	16.179.216.366
Nilai Buku per 31 Desember 2018	3.447.324.822

Penambahan Peralatan dan Mesin yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	162.200.500
Pengembangan Nilai Aset	-
Total	162.200.500

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.200.500
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-
	Total	162.200.500

Rincian nilai perolehan Peralatan dan Mesin per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Stationary Generating Set	4	1.606.886.460
2	Mesin Diesel	1	240.525.000
3	Kendaraan roda 4/6	9	2.312.446.364
4	Kendaraan roda 2	5	83.948.000
5	Mesin Fotocopy	12	554.691.500
6	Router	1	109.968.840
7	Alat Pemadam Kebakaran	3	455.602.730
8	Workstation	25	965.134.940
9	A.C. Split	128	1.820.736.390
10	Local Area Network (LAN)	2	313.896.440
11	P.C Unit	57	672.214.529
12	Note Book	35	404.895.000
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	63	206.174.765
14	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	38	786.196.980
15	Server	4	184.096.800
16	Peralatan dan mesin lainnya	2.075	8.909.126.450
Total		2.462	19.626.541.188

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp38.751,40 juta Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp38.751.396.650,00 dan Rp37.218.533.650,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.532.863.000,00 atau 4,11%.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018 Unaudited

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2017	37.218.533.650
Mutasi Tambah:	
Transfer Masuk	589.432.000
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	943.431.000
Reklasifikasi Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Total Mutasi Tambah	1.532.863.000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-
Reklasifikasi Keluar	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	1.532.863.000
Saldo per 31 Desember 2018	38.751.396.650
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	1.171.207.719
Nilai Buku per 31 Desember 2018	37.580.188.931

Penambahan Gedung dan Bangunan yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
KDP Penyelesaian	-
Jumlah	-

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	14.430.000
	Jumlah Belanja	14.430.000

Penambahan Gedung dan Bangunan yang dihasilkan oleh Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak sama dengan realisasi belanja modal dengan selisih sebesar Rp14.430.000,00 karena dipengaruhi oleh hal sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Penambahan Gedung dan Bangunan dari realisasi belanja selain Belanja Gedung dan Bangunan (1):	
Penambahan dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-
Total (1)	-
Penambahan aset selain Gedung dan Bangunan dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (2):	
Penambahan pada Peralatan dan Mesin	-
Penambahan pada Jalan dan Jembatan	-
Penambahan pada Jaringan	-
Penambahan pada Aset Tetap Dalam Renovasi	-
Penambahan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
Total (2)	-
Tidak menambah nilai aset pada Neraca (3):	
Penambahan pada Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	-
Tidak Dikapitalisasi	14.430.000
Total (3)	14.430.000
Total Penjelasan Selisih (2+3-1)	14.430.000

Rincian saldo Gedung dan Bangunan per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	31.370.529.000
2	Gedung Pos Jaga Permanen	2	60.144.000
3	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya	1	80.000.000
4	Bangunan Lainnya	3	95.575.800
5	Bangunan Tempat Parkir	2	789.386.850
6	Taman Permanen	1	37.553.000
7	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	2	1.372.287.000
8	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	4	664.409.000
9	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	5	789.991.000
10	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	3.235.407.000
11	Pagar Permanen	2	256.114.000
	Total	24	38.751.396.650

C.2.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp5.006,46 juta Nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp5.006.461.580,00 dan Rp5.006.461.580,00, terjadi kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00 %.

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Jalan dan Jembatan	-
2	Irigasi	66.904.000
3	Jaringan	4.939.557.580
	TOTAL	5.006.461.580

C.2.2.4.1. Jalan dan Jembatan

Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

C.2.2.4.2. Irigasi

Nilai perolehan Irigasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp66.904.000,00 dan Rp66.904.000,00, terjadi kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Irigasi adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Mutasi Irigasi
Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2017	66.904.000
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Reklas masuk	-
Total Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2018	66.904.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	2.867.316
Nilai Buku per 31 Desember 2018	64.036.684

Penambahan Irigasi yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Total	-

Penambahan Irigasi sebesar Rp0,00 tersebut bersumber dari realisasi belanja sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-
Total		-

Rincian nilai perolehan Irigasi per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Saluran Drainage	-	-
2	Sumur Artetis	-	-
3	Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan	-	-
4	bak Penyimpanan/Tower Air Baku	-	-
5	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	2	66.904.000
	Total	2	66.904.000

C.2.2.4.3. Jaringan

Nilai perolehan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp4.939.557.580,00 dan Rp4.939.557.580,00, terjadi kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Mutasi Jaringan
Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2017	4.939.557.580
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Reklas masuk	-
Total Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2018	4.939.557.580
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	3.943.562.779
Nilai Buku per 31 Desember 2018	995.994.801

Penambahan Jaringan yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Total	-

Penambahan Jaringan sebesar Rp0,00 tersebut bersumber dari realisasi belanja sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-
Total		-

Rincian saldo Jaringan per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	1	586.388.660
2	Instalasi Penangkal Petir Manual	1	63.524.450
3	Instalasi Generating Set	8	1.427.303.180
4	Instalasi AC	1	476.250.060
5	Instalasi Lain-lain	4	2.244.417.670
6	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA	1	136.861.560
7	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Sedang	4	4.812.000
	Total	20	4.939.557.580

C.2.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp204,86 juta Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp146.465.965,00 dan Rp144.014.550,00, terjadi kenaikan sebesar Rp2.451.415,00 atau 1,70% merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Aset Tetap dalam Renovasi	-
2	Aset Tetap Lainnya	146.465.965
	Total	146.465.965

C.2.2.5.1. Aset Tetap Renovasi

Nilai Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, tidak terjadi kenaikan/penurunan.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Renovasi adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Mutasi Aset Tetap Renovasi
Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2017	-
Mutasi Tambah :	
Pembelian	-
Transfer Masuk	943.431.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Total Mutasi Tambah	943.431.000
Mutasi Kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	943.431.000
Total Mutasi Kurang	943.431.000
Total Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2018	-

Penambahan Aset Tetap Renovasi yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Total	-

Penambahan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp0,00 tersebut bersumber dari realisasi belanja sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
5311	Belanja Modal Tanah	-
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-
5361	Belanja Modal Fisik Lainnya	-
Total		-

Nilai Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 tersebut terdiri dari uraian pekerjaan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 36
Rincian Aset Tetap Renovasi
Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai
1	Renovasi rumah dinas Wakil Ketua BPK RI	-
2	Renovasi rumah dinas Ketua BPK RI	-
3	Renovasi gedung dan bangunan milik BPK RI Perwakilan Prov. DKI Jakarta	-
4	Pemecahan sertifikat tanah milik Pusdiklat	-
5	Pekerjaan pos jaga rujab kalan BPK RI Perwakilan Prov. Riau	-
6	Sertifikasi dan balik nama tanah rumah jabatan kantor BPK RI Perwakilan Prov. Riau	-
7	Sertifikasi dan balik nama tanah rumah jabatan kantor BPK RI Perwakilan Prov. Gorontalo	-
8	Renovasi sarana dan prasarna Mess BPK RI Perwakilan Prov. Jawa Barat	-
9	Renovasi renovasi ruangan mess BPK RI Perwakilan Prov. Jawa Barat	-
Total		

C.2.2.5.2. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp146.465.965,00 dan Rp144.014.550,00, terjadi kenaikan sebesar Rp2.451.415,00 atau 1,70%.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2017	144.014.550
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	2.451.415
Pengembangan Nilai Aset	-
Total Mutasi Tambah	2.451.415
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	2.451.415
Saldo per 31 Desember 2018	146.465.965
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	24.505.030
Nilai Buku per 31 Desember 2018	121.960.935

Penambahan Aset Tetap Lainnya yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Total	-

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 tersebut bersumber dari realisasi belanja sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-
5361	Belanja Modal Fisik Lainnya	-
Total		-

Saldo Aset Tetap Lainnya per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Monografi	618	110.471.435
2	Buku Lainnya	34	1.357.000
3	Alat Musik Modern/Band	1	24.505.030
4	Lukisan Cat Minyak	7	7.135.000
5	Lukisan Bulu	1	2.007.500
6	Pahatan Batu	1	990.000
Total		662	146.465.965

C.2.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

C.2.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp21.321,36 juta Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp21.321.359.210,00 dan Rp21.021.549.119,00, terjadi kenaikan sebesar Rp299.810.091,00 atau 1,42%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	37.722.406.000	-	37.722.406.000
2	Peralatan dan Mesin	19.626.541.188	16.179.216.366	3.447.324.822
3	Gedung dan Bangunan	38.751.396.650	1.171.207.719	37.580.188.931
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.006.461.580	3.946.430.095	1.060.031.485
5	Aset Tetap Lainnya	146.465.965	24.505.030	121.960.935
Total		101.253.271.383	21.321.359.210	79.931.912.173

Sesuai dengan PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan KMK Nomor 145/KM.6/2104 tentang Perubahan atas KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, maka kebijakan akuntansi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 berubah, yang semula dilakukan penyusutan sejak tanggal perolehan menjadi dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap dimaksud.

*(Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Lampiran A.1)
(Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 18, 19, dan 20)*

C.2.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

C.2.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan TP/TGR Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

C.2.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

C.2.4. ASET LAINNYA

Aset Lainnya Rp204,86 juta Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp204.860.922,00 dan Rp225.413.742,00.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Rincian Aset Lainnya pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 39
Rincian Perbandingan Aset Lainnya
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Aset Tak Berwujud	589.547.680	589.547.680
2	Aset Lain-Lain	933.908.000	-
	Jumlah	1.523.455.680	589.547.680
	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	1.318.594.758	364.133.938
	Nilai Buku Aset Lainnya	204.860.922	225.413.742

C.2.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp589,55 juta Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp589.547.680,00 dan Rp589.547.680,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen berupa *Software*, Lisensi, dan Aset Tak Berwujud Lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 40
Rincian Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Nilai
1.	<i>Software</i>	384.019.500
2.	Lisensi	205.528.180
3.	Aset Tak Berwujud lainnya	-
	Total	589.547.680

(Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan-Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 16)

C.2.4.1.1. Software

Saldo *Software* per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp384.019.500,00 dan Rp384.019.500,00, tidak terjadi kenaikan/penurunan.

Rincian penambahan dan pengurangan *Software* adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Rincian Mutasi *Software*
Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2017	384.019.500
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Total Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2018	384.019.500
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2018	251.093.438
Nilai Buku per 31 Desember 2018	132.926.062

Penambahan *Software* yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Total	-

Penambahan *Software* sebesar Rp0,00 tersebut bersumber dari realisasi belanja sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-
5361	Belanja Modal Fisik Lainnya	-
52	Belanja Barang	-
	Total	-

C.2.4.1.2. Lisensi

Nilai Lisensi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp205.528.180,00 dan Rp205.528.180,00 tidak terjadi kenaikan/penurunan.

Rincian penambahan dan pengurangan Lisensi adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Mutasi Lisensi
Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2017	205.528.180
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Total Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	-
Total Total Kurang	-
Total Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2018	205.528.180
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2018	133.593.320
Nilai Buku per 31 Desember 2018	71.934.860

Penambahan Lisensi yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Total	-

C.2.4.1.3. Aset Tak Berwujud Lainnya

Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Aset Tak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

C.2.4.2. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain Rp933,90 juta Nilai perolehan Aset Lain-Lain per per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp933.908.000,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp933.908.000,00 atau 100,00%.

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup BPK serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Nilai perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 seluruhnya berasal dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

Rincian penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Rincian Mutasi Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2017	-
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	933.908.000
Total Mutasi Tambah	933.908.000
Mutasi Kurang:	
Transaksi Normalisasi BMN	-
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	933.908.000
Saldo per 31 Desember 2018	933.908.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain s.d. 31 Desember 2018	933.908.000
Nilai Buku per 31 Desember 2018	-

Rincian Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Sedan	-	-
2	Jeep	-	-
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	-	-
4	Aset tetap Yang tidak digunakan lainnya	134	933.908.000
	Total	134	933.908.000

Atas aset Mini Bus telah dilakukan lelang pada tahun 2018, terutama atas aset tetap lainnya yang telah diterima pendapatannya senilai Rp31.200.000, tetapi belum dihapuskan asetnya karena belum diterbitkan sk penghapusannya.

C.2.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Rp1.318,59 juta Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.318.594.758,00 dan Rp364.133.938,00, terjadi kenaikan sebesar Rp954.460.820,00 atau 262,11%.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Khusus Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan merupakan akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember

2018 disajikan sebagai berikut:

No.	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	589.547.680	384.686.758	204.860.922
2	Aset Lain-lain	933.908.000	933.908.000	-
Jumlah Aset Lainnya		1.523.455.680	1.318.594.758	204.860.922

C.2.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek Rp80,56 juta Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp83.756.487,00 dan Rp226.191.360,00. Kewajiban Jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 44
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	70.106.154	198.890.693
2	Pendapatan Diterima dimuka	13.650.333	27.300.667
3	Uang Muka dari KPPN	-	-
4	Pendapatan yang Ditangguhkan	-	-
Jumlah		83.756.487	226.191.360

C.2.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp70,10 juta Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp70.106.154,00 dan Rp198.890.693,00, terjadi penurunan sebesar Rp128.784.539,00 atau 64,75%.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp70.106.154,00 terdiri dari:

Tabel 45
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No.Akun	Keterangan	Jumlah
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-
212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	70.106.154
212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-
212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	-
Jumlah		70.106.154

Rincian penambahan dan pengurangan Utang Kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Rincian Mutasi Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2017	198.890.693
Mutasi Tambah :	
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	-
Belanja Barang yang masih harus dibayar	70.106.154
Utang kepada pihak ketiga lainnya	-
Total Mutasi Tambah	70.106.154
Mutasi Kurang :	
Pembayaran Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	131.690.287
Pembayaran Belanja Barang yang masih harus dibayar	67.200.406
Utang kepada pihak ketiga lainnya	-
Total Mutasi Kurang	198.890.693
Total Mutasi	(128.784.539)
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018	70.106.154

Mutasi tambah sebesar Rp70.106.154,00 berasal dari :

1. belanja barang berupa tagihan listrik yang belum dibayar sebesar Rp66.909.626,00.
2. belanja barang berupa tagihan telpon yang belum dibayar sebesar Rp3.196.528,00.

Mutasi kurang sebesar Rp198.890.693,00 berasal dari:

1. Adanya pembayaran kekurangan gaji/uang makan/TKPK/tunjangan beras yang berasal dari periode sebelumnya sebesar Rp131.690.287,00.
2. Adanya pembayaran kekurangan Belanja Barang yang berasal dari periode sebelumnya sebesar Rp67.200.406,00.

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp70.106.154,00 merupakan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar berupa belanja langganan listrik dan belanja langganan telpon.

(Daftar Pembayaran Saldo Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2018 dan Rincian Rekapitulasi Perhitungan masing-masing sub akun Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 34)

C.2.5.2. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp13,65 Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp13.650.333,00 dan Rp27.300.667,00, terjadi penurunan sebesar Rp13.650.334,00 atau

juta 50,00%.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun Barang/Jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Sewa Diterima di Muka.

Rincian penambahan dan pengurangan Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel 47
Rincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2017	-
Mutasi Tambah:	
Nilai sewa penempatan ATM yang belum digunakan per 31 Desember 2018	13.650.333
Total Mutasi Tambah	13.650.333
Mutasi Kurang:	
Jurnal balik per 1 Januari 2018 atas nilai sewa penempatan ATM yang belum digunakan per 31 Desember 2017	27.300.666
Total Mutasi Kurang	27.300.666
Total Mutasi	(13.650.333)
Saldo per 31 Desember 2018	(13.650.333)

Saldo Akun Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.650.333,00 terdiri dari :

Nilai sewa gedung & bangunan yang belum digunakan di BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.650.333,00;

(Rincian dan perhitungan Pendapatan Sewa Diterima di Muka dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 34)

C.2.5.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0,00 juta Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Uang Muka Dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan

C.2.6. EKUITAS

Ekuitas Rp80.280,67 juta Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp80.277.472.159,00 dan Rp77.401.028.697,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.876.443.462,00 atau 3,72% .

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam

Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Komposisi Perbandingan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 48
Komposisi Perbandingan Laporan Operasional
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	2018	2017	%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	(31.006.638.421)	(17.064.791.844)	81,70
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	63.736.021	6.093.402	945,98
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	-	-	-
Surplus/Defisit LO	(30.942.902.400)	(17.058.698.442)	81,39

Defisit Dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp31.006.638.421,00 terdiri dari Pendapatan Operasional sebesar Rp13.650.334,00 dan Beban Operasional sebesar Rp31.020.288.755,00.

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp63.736.021,00 terdiri dari Surplus Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp62.800.000,00, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00, serta Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp936.021,00.

Surplus Dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

(Laporan Operasional dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 8)

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

D.2.1. PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional Rp13,65 juta Saldo Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp13.650.333,00 dan Rp14,125.333,00. Keseluruhan Pendapatan Operasional merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 seluruhnya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya masing-masing sebesar Rp13.650.334,00 dan Rp14,125.333,00.

D.2.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Rp13,65 juta Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp13.650.334,00 dan Rp14.125.333,00, terjadi penurunan sebesar Rp474.999,00 atau 3,36%. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah pendapatan negara yang bukan merupakan pendapatan dari pajak atau pun pendapatan hibah dan bukan bagian dari pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam maupun pendapatan bagian pemerintah atas laba.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 49
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017
(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Pendapatan	2018	2017	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	13.650.334,00	13.650.333,00	-
2	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	-	-	-
3	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-
4	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
3	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	475.000,00	-
4	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	13.650.334,00	14.125.333,00	(3,36)

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp13.650.334,00 berasal dari Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar untuk sewa penempatan ATM.

D.2.2. BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional Rp31.020,29 juta Saldo Beban Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp31.020.288.765,00 dan Rp17.078.917.177,00.

Beban Operasional pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 terdiri dari:

Tabel 50
Rincian Perbandingan Beban Operasional
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2018	2017	%
1	Beban Pegawai	7.991.896.013,00	7.257.186.491,00	10,12
2	Beban Persediaan	523.223.680,00	531.322.148,00	(1,52)
3	Beban Barang dan Jasa	6.398.738.042,00	2.981.478.881,00	114,62
4	Beban Pemeliharaan	2.113.959.631,00	2.056.597.610,00	2,79
5	Beban Perjalanan Dinas	11.311.033.323,00	1.538.671.843,00	635,12
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.681.491.442,00	2.713.616.078,00	(1,18)
7	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(53.376,00)	44.126,00	(220,96)
8	Beban Lain-lain	-	-	-
Jumlah Beban Operasional		31.020.288.755,00	17.078.917.177,00	81,63

D.2.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp7.991,90 juta Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp7.991.896.013,00 dan Rp7.257.186.491,00, terjadi kenaikan sebesar Rp734.709.522,00 atau 10,12%. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 51
Rincian Beban Pegawai
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	2018	2017	%
1	Beban Gaji	5.439.921.208,00	4.943.958.186,00	10,03
2	Beban Tunjangan-Tunjangan	2.169.066.805,00	1.930.328.305,00	12,37
3	Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
4	Beban Lembur	382.908.000,00	382.900.000,00	0,00
Jumlah		7.991.896.013,00	7.257.186.491,00	10,12

D.2.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp523,22 juta Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp523.223.680,00 dan Rp531.322.148,00, terjadi penurunan sebesar Rp8.098.468,00 atau 1,52%. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 52
Rincian Beban Persediaan
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	2018	2017	%
1	Beban Persediaan Konsumsi	391.218.330,00	466.873.715,00	(16,20)
2	Beban Persediaan Bahan Baku	-	11.340.000,00	-
3	Beban Persediaan Lainnya	132.005.350,00	53.108.433,00	148,56
	Jumlah	523.223.680,00	531.322.148,00	(1,52)

D.2.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp6.398,74 juta

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp6.398.738.042,00 dan Rp2.981.478.881,00, terjadi penurunan sebesar Rp3.417.259.161,00 atau 114,62%. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 53
Rincian Beban Barang dan Jasa
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	2018	2017	%
Beban Barang				
1	Beban Barang Operasional	3.676.504.758,00	1.047.974.756,00	250,82
2	Beban Barang Non Operasional	1.044.102.020,00	851.940.599,00	22,56
3	Beban Kontribusi	-	-	
Beban Jasa				
1	Beban Langganan Daya dan Jasa	937.416.264,00	897.770.226,00	4,42
2	Beban Jasa Sewa	23.900.000,00	76.050.000,00	(68,57)
3	Beban Jasa Konsultan	547.315.000,00	-	
4	Beban Jasa Profesi	3.400.000,00	4.500.000,00	(24,44)
5	Beban Jasa Lainnya	166.100.000,00	103.243.300,00	60,88
Beban Barang Lainnya				
1	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Jumlah	6.398.738.042,00	2.981.478.881,00	114,62

D.2.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp2.113,96 juta

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp2.113.959.631,00 dan Rp2.056.597.610,00, terjadi kenaikan sebesar Rp57.362.021,00 atau 2,79%. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya

yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 54
Rincian Beban Pemeliharaan
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	2018	2017	%
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	981.772.000,00	812.852.790,00	20,78
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	436.935.572,00	434.932.835,00	0,46
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	668.203.059,00	748.841.085,00	(10,77)
4	Beban Pemeliharaan Jaringan	27.049.000,00	59.970.900,00	(54,90)
5	Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
	Jumlah	2.113.959.631,00	2.056.597.610,00	2,79

D.2.2.5. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp11.311,03
juta*

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp11.311.033.323,00 dan Rp1.538.671.843,00, terjadi kenaikan sebesar Rp9.772.361.480,00 atau 635,12%. Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 55
Rincian Beban Perjalanan Dinas
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	2018	2017	%
1	Beban Perjalanan Biasa	10.886.732.223,00	1.415.921.843,00	668,88
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	127.625.000,00	122.750.000,00	3,97
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	296.676.100,00	-	-
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
	Jumlah	11.311.033.323,00	1.538.671.843,00	635,12

D.2.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp2.681,49
juta*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp2.681.491.442,00 dan Rp2.713.616.078,00, terjadi penurunan sebesar Rp32.124.636,00 atau 1,18%. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan

untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 56
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.450.314.788,00	1.673.370.581,00	(13,33)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	957.070.509,00	808.188.267,00	18,42
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	164.935.950,00	167.195.722,00	(1,35)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Jumlah Penyusutan	2.572.321.247,00	2.648.754.570,00	(2,89)
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	109.170.195,00	64.861.508,00	68,31
6	Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
	Jumlah Amortisasi	109.170.195,00	64.861.508,00	68,31
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.681.491.442,00	2.713.616.078,00	(1,18)

D.2.2.7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp(0,05) juta

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp(53.376,00) dan Rp44.126,00, terjadi penurunan sebesar Rp97.502,00 atau 220,96%. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 57
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	2018	2017	%
1	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	(53.376,00)	44.126,00	(220,96)
2	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	-	-	-
	Jumlah	(53.376,00)	44.126,00	(220,96)

D.2.2.8. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Rp0,00 juta

Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Beban Lain-Lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

D.2.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional Rp63,74 juta

Jumlah Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

masing-masing sebesar Rp63.736.021,00 dan Rp6.093.402,00.

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 58
Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	2018	2017	%
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	62.800.000	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	62.800.000	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	936.021	6.093.402	(84,64)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.660.092	38.662.318	(90,53)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.724.071	32.568.916	(91,64)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	63.736.021	6.093.402	945,98

D.2.3.1. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

*Surplus/(Defisit)
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp62,80 juta*

Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp62.800.000,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp62.800.000,00 atau 100,00%. Surplus atau Defisit Pelepasan Aset Non Lancar merupakan kegiatan pelepasan Aset yang meliputi pendapatan hasil lelang dikurangi beban yang ditimbulkan atas selisih kurang nilai lelang dari nilai buku Aset Non Lancar.

Rincian Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 59
Rincian Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	%
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
	a Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	31.600.000	-	-
	b Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	31.200.000	-	-
	Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	62.800.000	-	-
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
	a Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	-	-
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
	Surplus/(Defisit)	62.800.000	-	-

D.2.3.2. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp0,94 juta Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp936.021,00 dan Rp6.093.402,00, terjadi penurunan sebesar Rp5.157.381,00 atau 84,64%. Surplus atau Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan kegiatan menerima pendapatan yang bukan pendapatan operasional dikurangi beban yang bukan beban operasional. Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 60
Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31
Desember 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017	%
1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
a	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	-	-	-
b	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
c	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
d	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
e	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
f	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	-	-
g	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	3.660.092,00	38.662.318,00	(90,53)
	Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.660.092,00	38.662.318,00	(90,53)
2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
a	Beban Kerugian Persediaan Rusak/Usang	760.150,00	32.568.916,00	(97,67)
b	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.963.921,00	-	-
	Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.724.071,00	32.568.916,00	(91,64)
	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	936.021,00	6.093.402,00	(84,64)

D.2.4. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Pos Luar Biasa per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 61
Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	%
Ekuitas Awal	77.401.028.697	57.201.436.510	35,31
Surplus/Defisit LO	(30.942.902.400)	(17.058.698.442)	81,39
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	(272.515.161)	14.658.668.862	(101,86)
Transaksi Antara Entitas	33.894.898.277	22.599.621.767	49,98
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	2.679.480.716	20.199.592.187	(86,73)
Ekuitas Akhir	80.080.509.413	77.401.028.697	3,46

Jumlah Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2018 sebesar Rp77.401.028.697,00.

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp30.942.902.400,00.

Jumlah Koreksi Yang Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp272.515.161,00.

Jumlah Transaksi Antara Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp33.894.898.277,00.

Jumlah Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp80.080.509.413,00.

(Laporan Perubahan Ekuitas dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 9)

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.2.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Rp77.401,03 juta Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2018 dan 1 Januari 2017 adalah masing-masing sebesar Rp77.401.028.697,00 dan Rp57.201.436.510,00. Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

E.2.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Surplus (Defisit) LO Rp30.942,90 juta Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp30.942.902.400,00 dan Rp17.058.698.442,00.
Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.2.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas Rp272,51 juta Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan Penyesuaian nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi serta Koreksi Lain-lain yang dilakukan pada periode berjalan terhadap nilai ekuitas dari akun-akun Aset pada tahun lalu.

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp272.515.161,00 dan Rp14.658.668.862,00.

Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 62

Rincian Perbandingan Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	%
1	Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-
2	Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-
3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	14.634.306.232,00	-
4	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(235.765.808,00)	-	-
5	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(44.308.687,00)	-	-
6	Lain-lain	7.559.334,00	24.362.630,00	-
	Jumlah	(272.515.161,00)	14.658.668.862,00	(101,86)

E.2.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

E.2.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00 juta Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

E.2.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00 juta Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp14.634.306.232,00.

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 63
Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

No	Jenis Aset tetap	31 Desember 2018	31 Desember 2017	%
1	Tanah	-	9.577.319.282,00	100,00
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	5.081.362.950,00	100,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	(24.376.000,00)	100,00
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Jumlah Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	14.634.306.232,00	100,00

E.2.3.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp280,07 juta Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp280.074.495,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi aset.

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 64
Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	%
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		(235.765.808,00)	-	-
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Aset Tetap Renovasi	-	-	-
5	Jalan dan Jembatan	-	-	-
6	Jaringan	-	-	-
7	Irigasi	-	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(168.861.808,00)	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(66.904.000,00)	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi		(44.308.687,00)	-	-
1	Software	-	-	-
2	Lisensi	-	-	-
3	Akumulasi Amortisasi Software	(44.308.687,00)	-	-
4	Akumulasi Amortisasi Lisensi	-	-	-
Jumlah Total		(280.074.495,00)	-	-

E.2.3.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain Rp7,56 juta

Saldo Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp7.559.334,00 dan Rp24.362.630,00.

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Tabel 65
Rincian Nilai Koreksi Lain-lain
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Koreksi	31 Desember 2018	31 Desember 2017	%
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	0,00
2	Piutang	(475.000)	8.640.000	(1,05)
3	Kewajiban	8.034.334	(17.662.568)	(1,45)
4	Pendapatan	-	24.260.000	(1,00)
5	Beban	-	9.125.198	(1,00)
Jumlah Koreksi		7.559.334	24.362.630	(0,69)

Rincian Koreksi Lain-lain senilai Rp7.559.334,00 untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 berasal dari:

1. Koreksi atas kelebihan pencatatan Piutang PNPB pada Semester I Tahun 2018 (Rp475.000,00).
2. Koreksi atas Kewajiban sebesar Rp8.034.334,00 berasal dari koreksi atas Belanja Pegawai yang masih harus dibayar di Semester I Tahun 2018 sebesar Rp8.034.334,00.

E.2.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas Rp33.894,90 juta Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp33.894.898.277,00 dan Rp22.599.621.767,00.

Transaksi Antar Entitas merupakan kegiatan entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antara Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 66

Rincian Perbandingan Nilai Transaksi antar Entitas
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	%
1	Diterima Dari Entitas Lain	(73.000.142,00)	(24.735.000,00)	195,13
2	Ditagihkan ke Entitas Lain	28.509.664.864,00	14.506.365.465,00	96,53
3	Transfer Masuk	5.458.233.555,00	8.117.991.302,00	(32,76)
4	Transfer Keluar	-	-	-
5	Pengesahan Hibah Langsung	-	-	-
6	Pengesahan Pengembalian Hiba	-	-	-
	Jumlah	33.894.898.277,00	22.599.621.767,00	49,98

E.2.4.1. Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar (Rp73.000.142,00) dan (Rp24.735.000,00).

Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp28.509.664.864,00 dan Rp14.506.365.465,00.

E.2.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset dan atau kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antara KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Saldo Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp5.458.233.555,00 dan Rp8.117.991.302,00.

E.2.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Tidak terdapat saldo dan mutasi atas akun Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

E.2.5. EKUITAS AKHIR

*Ekuitas Akhir
Rp80.280,67
juta*

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp80.080.509.413,00 dan Rp77.401.028.697,00.

F.1. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak terdapat pengungkapan lain-lain

F.3. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang dimiliki Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh Eselon I Setjen (kode satker 450774) yang masih dipertahankan adalah Rekening Giro pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 2211020207 atas nama BPG 001 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI PERWAKILAN PROVINSI ACEH (status aktif). KPPN Pemberi Persetujuan adalah KPPN Banda Aceh.

(Daftar rekening pemerintah dilampirkan sebagaimana format terlampir pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 27)

F.4. TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN OLEH KAP

(Rincian temuan dan Progres Tindak Lanjut atas temuan pemeriksaan KAP dilampirkan pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 28)